



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies



LAPORAN KEGIATAN  
PELATIHAN SDGS

# PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PENCAPAIAN SDGS GOAL 1, 5 & 8

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA



# Daftar Isi

<b>A.</b>	<b>Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B.</b>	<b>Materi Training .....</b>	<b>2</b>
<b>C.</b>	<b>Tujuan .....</b>	<b>2</b>
<b>D.</b>	<b>Narasumber.....</b>	<b>2</b>
<b>E.</b>	<b>Fasilitator .....</b>	<b>2</b>
<b>F.</b>	<b>Jadwal Kegiatan .....</b>	<b>2</b>
<b>G.</b>	<b>Peserta Kegiatan .....</b>	<b>4</b>
<b>H.</b>	<b>Notulensi Pelatihan SDGs .....</b>	<b>5</b>
	<b>Hari 1 .....</b>	<b>5</b>
	Materi I : Pemaparan Hasil Studi Baseline Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan SDGs no. 1, 5 dan 10.....	5
	Materi II : Kebijakan dan program SDGs no. 1, 5 dan 8 di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan daerah .....	8
	Materi III : Tiga tahun implementasi SDGs di Indoensia .....	12
	<b>Hari ke 2 .....</b>	<b>16</b>
	Materi IV : Peran perempuan sebagai Akselerator Pencapaian SDGs, Pemateri : Zumrotin K Susilo (Direktur Eksekutif- Yayasan Kesehatan Perempuan) .....	16
<b>I.</b>	<b>Dokumentasi.....</b>	<b>24</b>



## A.Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang mendorong perubahan yang mempunyai prinsip-prinsip universal, intergrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind.” SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang disepakati oleh 193 anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk di dalamnya Indonesia. SDGs di Indonesia dirumuskan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). PERPRES ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mencapai tujuan SDGs.

Pembangunan yang menggunakan kaca mata gender merupakan akselerator dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih dari dua tahun dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, kesetaraan gender merupakan hal mendasar untuk mewujudkan janji-janji keberlanjutan, perdamaian dan kemajuan manusia (UN Women 2018). Akan tetapi ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, baik dalam ruang publik ataupun domestik sehingga menghambat partisipasi untuk turut terlibat dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dengan 49,7 persen, perempuan merupakan hampir setengah dari populasi negara. Mayoritas dari mereka (66,2 persen) termasuk dalam kelompok produktif berusia 15-64 tahun. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Kawasan ASEAN dan PDB terbesar ke-16 di dunia, tetapi patut dipertanyakan apakah ini telah menguntungkan kesejahteraan perempuan terutama jika dilihat urutan Indonesia yang berada di peringkat ke-88 dari 144 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender (Forum Ekonomi Dunia 2016) setelah mendapatkan skor buruk pada partisipasi ekonomi, pemberdayaan politik, dan pendidikan.

Sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki fokus pada isu keadilan dan kesejahteraan, Perkumpulan PRAKARSA dan OXFAM Indonesia, bekerjasama dalam program strategis *Indonesian Women in Leadership for Gender Equality and Empowerment (I-WIL)*, yaitu program yang mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran aktor dan pemimpin perempuan di tingkat lokal terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengetahuan dan peningkatan kapasitas bagi aktor dan pemimpin perempuan, khususnya untuk mencapai SDGs Goal 1, 5, dan 8 karena agenda ambisius untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan harus diselaraskan dengan sumber daya yang ambisius.

Berdasarkan kondisi yang ada serta untuk memanfaatkan momentum Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada bulan Maret, PRAKARSA akan menyelenggarakan pelatihan selama dua hari dengan tema **“Percepatan Kapasitas Pengetahuan Pemimpin Perempuan dalam Pencapaian SDGs Goal 1, 5, dan 8.”**

## B.Materi Training

Training SDGs akan dilaksanakan selama dua hari dengan materi sebagai berikut:

1. Pemaparan Hasil Studi Baseline Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan SDGs no 1, 5 dan 10
2. Pencapaian SDGs Goals 1,5, dan 8 ditingkat nasional dan lokal.
3. Kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
4. Peran dan posisi perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
5. Startegi loby dan dialog CSO dan pemerintah untuk membangun kerjasama dalam pencapaian SDGs di tingkat Kota/Kabupaten

## C.Tujuan

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman aktor dan pemimpin perempuan di tingkat lokal terkait tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan 1, 5, dan 8.
2. Meningkatkan pemahaman perempuan terkait peran strategis dan potensi perempuan sebagai faktor percepatan pencapaian tujuan SDGs melalui peran dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
3. Memetakan posisi dan potensi aktor dan pemimpin perempuan di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## D.Narasumber

1. Dr. Djonet Santoso, MA (Direktur SDGs Center, Universitas Bengkulu)
2. Zumrotin K. Susilo (Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan)

## E.Fasilitator

1. Herni Ramdlaningrum (Perkumpulan Prakarsa)
2. Herawati (Perkumpulan Prakarsa)

## F.Jadwal Kegiatan

Hari/Tgl	Waktu	Kegiatan	PIC
<b>Rabu, 20 Maret 2019</b>	12:00 – 13:00	Registrasi dan Makan Siang	Panitia
	13.00 – 13.15	Overview Pelatihan SDGs	Herawati
	13.15 – 14.00	Pemaparan Hasil Studi Baseline Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan SDGs no 1, 5 dan 10	Herni Ramdlaningrum
	14.00 - 15:00	<b>Materi 1</b>	Narasumber :

		Tiga tahun implementasi SDGs di Indonesia; Capaian, Tantangan, dan Usulan Kedepan	Dr. Djonet Santoso, MA Fasilitator: Herni Ramdlaningrum
	15.00 – 15:30	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	15.30 – 17:30	<b>Materi 2</b> Kebijakan dan Program SDGs No. 1, 5, dan 8 di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	Narasumber: Dr. Djonet Santoso, MA Fasilitator: Herni Ramdlaningrum
<b>Kamis, 21 Maret 2019</b>	08:00 - 08.30	Registrasi hari kedua	Panitia
	09:00 – 12:00	Peran Perempuan Sebagai Akselerator Pencapaian SDGs	Narasumber: Zumrotin K Susilo Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan Fasilitator: Herni Ramdlaningrum
	12:00 – 13:00	Makan Siang	Panitia
	13:00 – 15:00	<b>Diskusi Kelompok:</b> Partisipasi Perempuan untuk mencapai SDGs	Fasilitator: Herawati
	15:00 – 15:30	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	15:30 – 16:30	<b>Diskusi Kelompok</b> Menyusun Rencana Lobby dan Dialog dengan Pemerintah untuk pencapaian SDGs No. 1, 5, dan 8	Fasilitator: Herni Ramdlaningrum

## G. Peserta Kegiatan

Pelatihan SDGs di NTT dihari oleh 30 peserta yang terdiri dari 26 Perempuan dan 4 Laki-laki. Peserta pelatihan merupakan perwakilan organisasi lokal yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut:

Perwakilan Peserta	Nama Organisasi	Kab/Kota
7 orang	Yayasan PIKUL	Kota/Kabupaten Kupang
3 orang	Bengkel APEK	Kota/Kabupaten Kupang
2 orang	LBH APIK	Kota/Kabupaten Kupang
2 orang	YABIKU	TTU
1 orang	KPI TTS	TTS
3 orang	Konsorsium Adil dan Merata	TTU/TTS/KUPANG
2 orang	YSPP SOE	TTS
2 orang	LOPO Belajar Gender	Kota/Kabupaten Kupang
2 orang	Perkumpulan TAFENA Tebua	Kota/Kabupaten Kupang
2 orang	CIS Timor	Kota/Kabupaten Kupang
2 orang	Geng Motor Imur	Kota Kupang
1 orang	SKOLMUS	Kota Kupang
2 orang	Kepala Desa	Kabupaten Kupang

# H. Notulensi Pelatihan SDGs

## Hari 1

Waktu Mulai : 13.38 WITA

Mc : Hera

Kata pengantar : Mbak Herni

Tujuan kegiatan ini dapat dilakukan untuk memicu pencapaian SDGs dan melakukan advokasi pada pemerintah, dimana SDGs erat hubungannya dengan isu yang berkembang saat ini.

Perkenalan Peserta : Nama, lembaga/instansi/ lembaga

Jumlah peserta : 23 orang (Panitia termasuk didalamnya)

SESI 1 mulai : 13.52 WITA

### Materi I : Pemaparan Hasil Studi Baseline Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan SDGs no. 1, 5 dan 10

#### Baseline study di kabupaten Pangkajene dan kepulauan, kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Dompu

Pemateri: PRAKARSA Mbak Herni

SDGS 1,5, dan 8 merupakan indicator global, membutuhkan semua stake holder dan pemimpin laki-laki. Saat ini Pemimpin perempuan harus berpartisipasi dalam mencapai SDGs. Studi awal dilakukan untuk meneliti pencapaian penerapan SDGs di pemerintah.

Studi dilakukan selama 3 bulan. Tujuan baseline mengukur dan melaporkan kapasitas pemerintah daerah implementasi goals 1, 5 dan 10 (mengurangi ketimpangan social). Mengukur kebutuhan pemerintah, dan dapat mengisi kelemahan dari pemerintah. Hal ini diberikan untuk stake holder agar dapat mendukung pemerintah untuk mencapai SDGs.

Tahapan penelitian: pengkajian literature, Konsultasi dengan ahli, dan wawancara mendalam pada pemerintah dari 3 kabupaten tersebut.

(Tabel capaian)

Tujuan	Target	Indicator
1	7	30
5	9	21
10	7	45

Cara menghitung baseline dengan cara scoring dan coding, penilai diberikan skor 3 pada tiap indicator agar mendapat capaian yang telah dilakukan. Sehingga tiap kab. Memiliki skor indicator masing2.

Pengumpulan data: informan: pemda (bapeda, dinas perlindungan perempuan dan anak, dinkes), lembaga keuangan, swasta, akademisi dan CSO.

## Hasil Riset Baseline

### *Kab. Pangkep:*

Telah tersedia keputusan bupati no. 506 thn 2018 pemerintah membentuk lintas OPD sehingga SDGs dapat dilakukan. Kab, pangkep sudah memiliki matriks SDGs rencana daerah. Tantangan: Tingginya mutasi (Informasi ttg SDGs tidak diturunkan) sehingga sulit untuk di terapkan, terputusnya informasi dan tidak adanya knowledge management.

### *Kab. TTS*

Pemda belum mengembangkan kebijakan terkait implementasi SDGs, belum memiliki pemahaman komperhensif tentang SDGs, belum ada payung hukum sehingga tdk dapat mengawal pencapaian SDGs, tantangan: koordinasi antar dinas terputus, kelembagaan TKPK kab. Belum berjalan optimal.

### Kesimpulan

Kab. TTS belum siap unruk menjalankan capaian SGD's dan sadar unruk memulainya

### *Kab. Dompu*

Memiliki persoalan ketimpangan yang cukup tinggi dari angka ketimpangan sosial, sehingga dikeluarkan keputusan untuk dapat mengatasi ketimpangan ini lebih cepat.

Ketertarikan antara satu tujuan dengan tujuan yang lain, pelaksanaan yang dapat diukur dan diakses, keterlibatan multipihak dan kerjasama.

### Hasil Penelitian baseline

### ***Tabel Skor kesiapan***

## Sesi Tanya Jawab

### Pertanyaan 1:

#### **Bpk Desa Tunfeu Martinus**

*“Kemiskinan, usaha desa melalui dana desa dan bantuan pemerintah bantuan beras raskin, dan bidang pemberdayaan (pengadaan ternak babi, sapi), masyarakat tidak berkembang. Sehingga yg dilakukan desa adalah pembuatan surat jaminan. Melihat problema ini dimanakah letak masalahnya apakah terletak di desa atau masyarakat itu sendiri?”*

*Bantuan PKH 93 KK desan tunfeu, dan masyarakat mendapat dana 2jt/ KK tetapi tidak mengembangkan dana yang diterima, yang dilakukan desa mengingkai untuk adanya regulasi. Sehingga kesimpulannya masyarakat yang tidak mau berubah.*

*Kesetaraan gender : upaya sudah dilakukan 2016 saat dilantik sebagai kepala desa. Merekrut perangkat desa dan RT/ RW, ada perempuan yang mencalonkan diri tetapi kaum perempuan juga tidak mendukungnya.”*

### Pertanyaan 2 :

#### **Ibu Ana Djukana**

*“Produk2 hukum yang netral hukum, bagaimana akses perempuan untuk meminjam uang di bank untuk memulai usaha?”*

*Tidak larang perempuan meminjam, tetapi konstruksi social dalam pengisian form harus izin dulu ke suami”*

### Pertanyaan 3

#### **Ibu Ansi Rih Dara:**

*Share : “Thanks untuk bpk desa yg telah melakukan usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pertemuan desa.”*

*Saran : “Dana PKH jika diberikan ke suami maka suami memilih ke pak laru, sebaiknya dana tersebut ke istri agar dapat di kelola oleh istri. Pengadaan ternak juga bisa diberikan bersama Ibu atau istri agar dapat dikelola dengan baik.”*

## Jawaban

#### **Mbak Herni :**

1. Pemda berupaya untuk menanggulangi upaya kemiskinan, ketimpangan social
2. Partisipasi kaum perempuan dapat dijadikan sebagai langkah konkrit

Mengurangi ketimpangan harus memberikan akses pekerjaan kepada orang tersebut tetapi diperlukan pendidikan yang cukup untuk mencapainya.

## Jawaban

#### **Pak Marthinus Leli Desa Tunfeu :**

*“PKH tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga pemerintah desa akan susah mengintervensi. Pendamping PKH perlu berkoordinasi dengan pemerintah DESA. Saran*

*PEMDA Kab. Kupang harus mengeluarkan surat keputusan agar mendukung program desa untuk SDGs”*

### **Ibu Ana Djukana**

*Perlu di perhatikan program PKH dan SDGs seperti apa?*

*Pihak PEMDA TTS sudah menyatakan bahwa SDGs sudah termasuk dalam RPJMD*

### **Ibu Frederika Tadu Hingu :**

Menurunkan angka kematian ibu dan anak di TTS, terutama faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat cara hidup tradisional dll,

Cara tradisioanal dilakukan karena akses terhadap kesehatan sangat terbatas. Mohon asumsinya (hasil riset baseline dari PRAKARSA) tidak sesuai dengan fakta dilapangan di Kab. TTS. Justru cara tradisional dukun beranak membantu persalinan Ibu.

Cifon apa dalam pelitian dapat dikatakan sebagai faktor menyebabkan tidak terealisasinya atau menghambat goals SDGs?

Fasilitas kesehatan di TTS, kebijakan2 nasional akreditasi puskesmas apakah ini juga dilihat sebagai salah satu faktor dalam pencapaian SDGs?

### **Mbak Herni :**

Tidak semua praktek tradisional itu buruk, tetapi karena praktek tradisional tidak melibatkan pemerintah. Contoh : Dukun di Desa Jawa Barat kurangnya atau keterbatasan pengetahuan hingga anak berusia 1 minggu di sarankan unotk diberikan makan pisang jika ibu bayi tidak menghasilkan ASI. Hal ini merupakan contoh praktek tradisional yang meningkatkan kematian bayi dan gangguan kesehatan pada anak-anak.

## **Materi II : Kebijakan dan program SDGs no. 1, 5 dan 8 di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan daerah**

**Waktu 14: 38 WITA**

**Moderator mbak herni**

**Pemateri pak Dr Djonet Santoso, MA (SDGs Center Universitas Bengkulu)**

### **Perkenalan**

Lahir di Jogja, S1 di Jogja, kerja di Bengkulu dan mengajar di universitas di Bengkulu

### **Pengantar**

Seberapa banyak kita mengetahui tentang SDGs? Sehitga kita bisa tahu arah pembahasan. SDGs dari 2016 sudah dimulai disosialisasikan.

Pembangunan untuk siapa SDGs ini, pemateri memberikan 3 gambar:

Fig 1 : semua mendapatkan fasilitas yang sama kesetaraan:

Fig 2 : setiap orang mendapatkan fasilitas dan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing: keadilan

Fig 3 : menghapus semua halangan dan hambatan bagi semua individu (akses dibuka untuk semua)

Pembangunan adalah bagaimana kita mencari cara untuk semua orang dapat mendapat akses yang baik. Tahun 2000-2015 bekerja dalam payung SDGs ada 8 tujuan apakah kita sudah mencapai ini? Persoalan yang dapat menunjukkan ketercapaian SDGs adalah pemerintah, tetapi terlupakan datanya.

SDGs 2015- 2030 ditambah tujuannya sampai 17, bukan saja data tetapi substansinya juga ditambahkan lagi dengan Isu lingkungan. 17 tujuan ini telah mencakup semua sektor pembangunan di daerah. Gerakan SDGs melibatkan semua pihak yang bergerak dan bersinergi sesuai peran dan fungsi. Mengurangi kemiskinan, menghargai lingkungan dimana terjadi kesetaraan pada semua masyarakat

Dari 17 Tujuan dibagi 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan:

Pilar social (1,2,3,4,5) Lingkungan (6, 11,12,13,14,15) Ekonomi (7,8,9,10,17) Hukum dan tata kelola (16)

Prinsip kemitraan dan partisipasi para pihak: pemerintah dan parlemen (1), pelaku usaha (2), (3) ormas dan media (3) dan akademis dan pakar : inovasi pencapain SDGs(4) melihat ini SDGs merupakan tanggung jawab bersama. (keterlibatan, katalism kepemilikan bersama dan kerangka komprehensif). Kata kuncinya **kita harus bermitra mencapai SDGs.**

Harapan dari kegiatan ini semua peserta memahami perannya dalam pencapaian SDGs.

### Komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs

Kebijakan LN (bebas dan aktif), agenda pembangunan, dasar hukum Perpes no. 59 tahun 2017 sebagai panduan mitra pemerintah.

Perpes no, 59 tahun 2017 pedoman bagi kementerian/ lembaga, dan acuan bagi ormas, pelaku usaha dan lainnya. Target dan tujuan adalah indicator pada tiap Pilar dimana Pilar 1 (85), Pilar 2 (76), pilar 3 (74) dan pilar 4 (5). RPJMN sudah termasuk didalamnya data dan indicator dari SDGs, hal inilah yang dilakukan oleh pemda untuk menyesuaikan RPJMDnya, sehingga peran kita harus mencermati dan memberikan saran untuk melaksanakan program SDGs.

Tantangan yang dihadapi yaitu geografi Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi, berkurangnya tingkat pengangguran dan koefisien, peningkatan indeks pembangunan manusia, kesenjangan ekonomi.

Tantangan pelaksanaan: **No one left behind**: satu orang pun tidak boleh ketinggalan artinya setiap yang terlibat harus melibatkan semua dalam merencanakan capaian SDGs, kelompok yang menjadi tanggung jawab maka semua kelompok harus di selesaikan tidak boleh dilalaikan, olah karena itu kita harus punya data yang sesuai dalam capaian dan data tentang kelompok yang dilibatkan. Data yang diperoleh harus akurat dan tepat. Intregasi program dari setiap mitra untuk itu diperlukan keterbukaan, menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non pemerintah dalam pencapaian, dan data base; menyelaraskan rencana aksi kedalam rencana pembangunan.

Kompleksitas TPB/SDGs yang perlu dilakukan adalah 1. Political will, 2. Legal basis yang kuat (memetakan kebijakan daerah yang sesuai dan cocok juga yang belum, kemudian disesuaikan dengan kebijakan pemerintah nasional), dan 3. Strategi yang baik berkaitan dengan proses yang partisipatif dan terukur (sumber dana, monitoring dan evaluasi juga komunikasi).

Sumber pembiayaan APBN dan APBD tetapi tidak menggantungkan sepenuhnya tetapi mencari sumber daya lain sehingga APBN dan APBD menjadi pilihan terakhir, diperoleh dari swasta dan lembaga asing dan badan usaha swasta lainnya (Sumber-sumber pembiayaan: 1. Organisasi penerimaan negara (pajak, cukai, PNPB, grat, retribusi), 2. sumber pendanaan non pemerintah, dan 3. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Cara untuk mendapatkan bantuan dana harus ada proposal yang menjelaskan tujuan yang akan dilakukan pada daerah yang menerapkan SDGs.

Keterlibatan swasta dalam SDG dalam perpes no. 59/2017.

Tujuan 1: mengakhiri kemiskinan

Sejauh ini BPS hanya memberikan data penurunan angka kemiskinan sehingga tidak terlihat menurunkan masalah kemiskinan. Hal inilah yang tidak muncul dalam data statistik kita. Berikutnya angka partisipasi Murni yaitu proporsi penduduk pada kelompok umur dan jenjang pendidikan tidak terlihat secara real, karena yang dipaparkan jumlah secara keseluruhan. Untuk kesetaraan gender belum bisa di jelaskan, oleh karena itu masalah kita bersama adalah adanya data jumlah angka gender.

Kasus prevalensi kekerasan pada anak perempuan, persentasi kursi yang diduduki perempuan di DPR data yang muncul adalah data jumlah orang tetapi yang diperlukan adalah penjelasan masalah dari jumlah orang tersebut itulah yang dibutuhkan.

Pemaparan data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamian dan kelompok umur, dalam skema gender ini adalah tenaga perempuan yang terkurasi dari bagian ini. Jika pengangguran terbuka terus terjadi maka yang menjadi sasaran adalah kaum wanita

### **Prinsip analisis gender**

1. Sensifitas perencanaan,
2. komitmen politik,
3. Analisis sisten nilai,
4. Ketersediaan gender statistik,
5. Melakukan pemilahan,
6. Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan
7. Keterlibatan perempuan dalam melakukan evaluasi.

Tindak lanjut di pemerintah pengeluaran surat keputusan sesuai dengan tahapan2 terlebih dahulu sebelum mengeluarkannya.

**(Break 10 menit)**

**16.14 WITA SESI III**

**Irisan Indikator TPB, RPJMD dan SPM**

Indikator apa saja yang masuk dalam TPB kabupaten, RPJMD, dan SPM bisa masuk sekaligus, jika kita sudah paham akan hubungan antar tiga komponen tadi untuk memasukan gerakan data gender

#### Tantangan penyusunan pelaksanaan SDGS

1. Penyepakatan tujuan, target, dan indicator daerah untuk SDGs
2. Satu basis data 2018 untuk pencapaian 2030 ; Sampai data sekarang data 2 atau 3 tahun lalu, oleh karena ketersediaan data yang terupdate satu tahun sebelumnya.
3. RAD yang terintegrasi dengan RPJMD  
Kita harus mengetahui irisan indicator TPB, RPJMD dan SPM
4. No one left behind  
Kunci dari pencapaian SDGs

#### Penyusunan RAD TPB/ SDGs

1. RAD TPB dan SDGS dilakukan oleh pemda provinsi dengan pemda kota/ kab.serta melibatkan organisasi non pemerintah
2. Permendagri no.7/ 2018 tentang KLHS RPJMD (basis hukum)
3. Periode RAD TPB/ SDGs menyesuaikan waktu RPJMD yang berjalan
4. Matrik RAD TPB kab/Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Propinsi
5. Pemda Kab/kota dapat menyusun anggaran secara lengkap
6. ...

Ada delapan tindak lanjut di daerah dan Rujukan penyusun RAD-TPB; 9 tahapan penyusunan RAD; Struktur tim koordinasi SDGs Daerah (ada dalam PPT)..

Contoh Matriks Rencana aksi SDGS/TPB (pemerintah, Organisasi non pemerintah), Matrik tabel dan indicator, matrik rencana aksi daerah. (Ada dalam PPT)

#### **Selesai materi 16.32 WITA**

## Sesi Tanya jawab

### Pak Kades Marthinus Leli:

1. *RPJMD disusun oleh pemerintah desa harus ada perencanaan musrembang des, musrembangdus, musrembangcam dan musrembangkab. Adanya indikasi kepentingan pribadi yang diutamakan sehingga terjadi kendala dalam pelaksanaan program di desa. Bagaimana cara mencapai SDGs 1, 5 dan 8 jika masih ada intervensi oknum tertentu terhadap program untuk kepentingan sendiri?*
2. *Berkaitan dengan gender dan tindakan tradisional (Dukun, sifon dll) karena masyarakat miskin untuk mendapatkan akses kesehatan*

### K Coni Tiluata (Share)

*Pokja SDGs sudah ada di kota kupang, kendala pemahan SDGs pemda yang belum baik yang membuat mereka berpikir bahwa akan menambah beban kerja dan tidak ada input bagi mereka.*

*Usulan pemahaman SDGs bagi pemda, TKPD kota kupang tidak jalan sehingga tidak adanya dukungan antara pihak mitra. Update data dari tiap desa belum telaksana dengan baik, di kota kupang terlihat stagnan, sehingga data propinsi mengambil aksi pokja kota kupang untuk menggambarkan propinsi.*

*Saran: bagi peserta harusnya pemahaman harus di selesaikan baru dijalankan program untk pencapaian SDGs*

### Kades Yopi Saudale

1. *Bagaimana cara kita menurunkan kemiskinan kalo orang miskin melahirkan orang miskin?*
2. *Orang miskin banyak terdapat dideda, sehingga membangun Indonesia dari pinggir. Tetapi sasaran tidak tepat setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah. Data itu penting untuk menyelesaikan*
3. *Kesetaraan gender. Bagaimana melibatkan perempuan dalam memberikan persoalan dalam rapat di desa bukannya hanya kehadiran pemenuhan jumlah? Strategi yang diterapkan ada pertemuan kelompok perempuan dilakukan sebelum musrenbangdes dilakukan.*

**Menjawab share dan pertanyaan dari peserta Dr Djonet melanjutkan materi yang sudah mencangkup pertanyaan dari tiap peserta.**

## Materi III : Tiga tahun implementasi SDGs di Indoensia

Pada tahun 2017- 2018 (baru memulai menyusun program SDGs), 2018 dan 2019 (mengevaluasi) implementasinya belum dilakukan.

2018-2030 Implementasi, monev, dan pelaporan, Road map SDGs belum selesai dari pihak pemerintah nasional (Bapenas), permern PPN 7/ 2018: koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan. Hal ini harus dilakukan agar tahun berikutnya dapat dievaluasi, yang perlu diperkuat data baseline-nya mulai dari tahapan desa, kec. Kab. Hingga propinsi harus paham.

Ujung tombak pencapaian SDGs ada di desa harus punya data masyarakat dan diperbaharui tiap tahun. Prinsip no one left behind (akurasi data, kualitas capaian, strategi pencapaian, dan kualitas kemitraan); harus diperhatikan kualitas bukan kuantitasnya sehingga pada tahun

2024 harus selesai dimana data sudah stabil sehingga dapat di evaluasi, akhirnya pada tahun 2030 kita dapat melihat pencapaian dari SDGs yang telah dimulai.

### ***Apa kata dunia tentang capaian SDGs di dunia 2018***

***Kofianan Sekeen PBB; Jika tanpa data maka kita seperti orang buta dan kita tidak dapat menyelesaikannya.***

Tujuan dari SDGs saling mempengaruhi yang lainnya. Dari 156 negara Indonesia terletak pada urutan 99 nilainya 62.8% dan regional asia 64. 1 %, dari sisi angka kemiskinan Indonesia telah menurun namun masih dipertanyakan kualitasnya. Indonesia masih belum punya data dari 17 tujuan SDGs.

Simbol 5 panah menggambarkan pencapaian Indonesia SDGs (ada di PPT) : Basis data dan capaian (Ada di PPT)

Dalam basis data data lain dalam target untuk tiap indicator di Indonesia dari provinsi hingga nasional belum terselesaikan datanya sehingga untuk memulainya kita tidak mengetahui data dasar.

Capaian kinerja tujuan 1.1 SDGs pengurangan kemiskinan kab./ kota provinsi NTT sesuai target kota kupang, kurang berhasil sumba tengah, sedangkan seban besar kabupaten kurang besar.

Simulasi capaian kinerja indicator tujuan 1.1 SDGs- Pengurangan kemiskinan Kota Kupang. Maka data yang dilihat data Kota --- kecamatan – kelurahan/ desa, sehingga kita bisa lebih focus menyelesaikan masalah datanya. Jika tidak ada data formal maka data warga itu penting bagi aparat desa atau LSM.

Tantangan pencapaian SDGs

1. Ketersediaan data (Tidak semua indicator tersedia data, kerahasiaan data, ases data sulit, UU statistik n0. 16/1997; hanya ada data cross-sectional, tidak ada data longitudinal; data kadaluwarsa da kualitas sumber data; tidak ada data berbasis desa/ kelurahan).
2. Peraturan dan kebijakan yang tidak kondusif
3. Pemahaman terbatas tentang partisipasi
4. Masalah SDGs (Indikator terlalu komlit dan sulit dipahamai; kewenangan penyusunan RAD hanya di provinsi; SDGs hanya program nasional, anggaran)

Rekomendasi: Kabupaten/KotasSDGs

1. Penyusunan data base di tingkat desa/ kelurahan
2. Capacity building untuk semua mitra SDGs di daerah (tujuan untuk memperbaharui data)
3. Mengembangkan SDGs forum di semua tingkatan

***Selesai materi 17.43 WITA***



## Sesi Tanya jawab

### Pertanyaan sesi I

**Ibu sabrina :**

*Data desa sudah terekap dengan baik Kader posyandu persalinan dan pendidikan juga kesehatan. Kemudian didata untuk mencapai SDGs. Pembuatan peta desa secara jelas. Saran pemerintah desa harus mengetahui tentang birokrasi.*

**Ibu Ansi Rih Dara**

1. *Apakah 11 tahun kedepan kita bisa tidak kita bisa mencapai SDGs 1, 5 dan 8?*
2. *Bagaimana kolaborasi pemerintah dan NGO mencapai SDGs? Dimana NGO tidak memperoleh biaya yang cukup untuk mencapai tujuan SD tetapi NGO sendiri memiliki resource terbesar terlihat dari road map*

**Ibu Ana Djukana**

1. *Solusi seperti apa untuk penyediaan data oleh BPS dapat memberikan satu data sebagai indicator untuk pencapaian SDGs*

**Tanggapan Oleh pak Dr Djonet**

- ✓ Jika ada yang punya semangat seperti mama Sabrina kader posyandu maka ketersediaan data desa bisa diperoleh.
- ✓ Pelibatan NGO sudah dilakukan oleh pemerintah dengan system POKJA . jika bisa kemiskinan apa kita bisa mancpai nol maka itu mustahil, jika kita punya data maka bisa berhasil dima kita bagi pertahun, namun masalah lainnya mitra juga berjalan sendiri-sendiri. Hambatan yang mengkhwartikan iklim masing2 mitra untk bersama-sama memiliki tujuan yang sama dalam mencapai SDGs. ; Sinergitas antar mitra inilah yang paling penting
- ✓ Pendanaan antar BAPENA dan BAPEDA berbeda, masalahnya masing- masing punya kepentingan. Kelemahan daerah adalah ketidak mampuan untuk share pendanaan untuk melaksanakan SDGs. Untuk itu sosialisasi pemahaman sangat penting terutama tujuan SDGs mulai dari tingkat desa.
- ✓ Pembicaraan tentang penyiapan sumber daya untuk menyiapkan baseline data, salah satu solusinya libatkan akademisi (PT) karena mereka memiliki peran yang besar untuk pemberdayaan masyarakat. Fokuskan dengan forum-forum dari tingkat kab. Hingga desa

### Pertanyaan sesi II

**Bpk Desa Marthinus Leli**

- ✓ *Desa harus memperbaiki profil desa, namun masyarakat tidak memberikan data real*

**Bapak Yopi Saudale**

- ✓ *Kader posyandu saling berkoordinasi mengenai data*
- ✓ *Data yang tidak valid dari masyarakat dapat di cek dengan data posyandu; dana yang masuk ke desa bisa kita intervensi untuk SDGs, tetapi tidak semua dana yang masuk bisa diintervensi oleh desa. Masalah terlihat terbentur dengan peraturan bupati dan lainnya*

**Tanggapan Oleh pak Dr Djonet**

Ketika menyusun program desa maka kita harus punya data2 yang sesuai supaya bisa menyesuaikan dengan SDGS, untuk biayanya maka dana yang sudah masuk dalam kewenangan desa meskipun kecil bisa berhasil mencapai SDGs pada kader desa.



## Hari ke 2

Waktu mulai : 09.21 WITA

Mc : Mbak Herni

### Materi IV : Peran perempuan sebagai Akselerator Pencapaian SDGs, Pemateri : Zumrotin K Susilo (Direktur Eksekutif- Yayasan Kesehatan Perempuan)

#### Pembukaan

Pemerintah belum berani melibatkan stake holder, sehingga saya mau menyampaikan bahwa para aktivis LSM perempuan harus berani berkolaborasi dengan pemerintah. Hal yang paling muncul dari pihak LSM adalah sikap egoism untuk mementingkan program dan berebut dana. Terutama dalam memulai Isu jangan berebut sehingga focus dalam pengerjaan program.

Potensi perempuan NTT luar bisa tetapi harus membangun kolaborasi Kesetaraan gender tidak terlepas dengan kesehatan, air bersih dan keuangan. Air bersih kaitan erat dengan perempuan. Kontribusi Ibu2 sangat besar dalam kehidupan sehari2 memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi tidak dihitung karena bernilai domestik. Kesehatan juga berkaitan dengan perempuan, dirumah sakit misalnya: Ibu mengantar anak sakit, suami sakit diantar istrinya, ibunya sakit diantar anak perempuannya melihat ini kenyataan bahwa perempuan berperan penting dalam bidang kesehatan.

Nah ... melihat problem ini kesehatan perempuan harus diperhatikan. Salah satunya Gizi remaja harus diperhatikan karena menentukan masa depan anak bangsa.

Perkawinan anak terbesar di Indonesia, anak dibawah umur. Kesehatan reproduksi anak perempuan harus diperhatikan sementara saat ini alokasi dananya sangat rendah. Contoh di Tuban : pernikahan anak usia muda meningkatkan peserlingkuhan, melihat ini pendidikan tentang pernikahan usia dini diperlukan. Kanker serviks (berkembang 10-15 tahun dari menikah) tinggi karena pernikahan usia muda dimana vagina dan Rahim masih ranum yang menimbulkan luka sebagai awal kanker serviks. Terbaru keputusan MK pernikahan anak perempuan dan perempuan harus sama

Kemiskinan memberikan dampak ke perempuan. Gender di Goals 5 tidak harus berdiri sendiri tetapi menyentuh 16 goals lainnya

#### Diskusi Interactive

##### Ibu Ansi Rih Dar

- ✓ *Pak Djonet sudah memberikan pemahaman dan data yang akurat. Target 2030 kurang lebih 11 tahun mencapai goals 1,5 dan 8 namun mengalami kendala infrastruktur dan pemahaman juga kolaborasi yang belum baik. Goals 5 adalah pekerjaan yang sudah dilakukan namun pemerintah belum ada aturan yang mengikat.*
- ✓ *Isu yang dibangaun tidak dielaborasi dengan baik dan tidak, saya merasa pesimis tujuan ini dapat tercapai*

## Tanggapan Ibu Zum

Sosialisasi masih sangat minim, rapat kerja kab. Di Jakarta hanya 1 sesi namun belum berdampak. Baru 18 propinsi yang punya RAD dan pada tingkat kabupaten kab. Kupang dan Kab, Pangkep ada karena ada LSM yang bergerak dan adanya dana untuk mensosialisasikan di daerah kerja. Sehingga saat ini ada usulan ke BAPENAS dan DEPdagri untuk mensosialisasikan SDGs.

Masalah pesimisnya Ibu Ansi:

Mengurangi Angka kematian Ibu – NTT ada revolusi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Akreditasi Puskesmas (Level Pemerintah), Peningkatan sarana dan SDM, BLUD dan akreditasi level B. suami siaga, Naketi: pengambialan keputusan yang cepat. Hal ini merupakan tindakan2 yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai goals SDGs, jadi tidak boleh pesimis. Semua program pemerintah sudah mendukung SDGs, namun pemahaman dan keterlibatan serta pengontrolan terus di tingkatkan.

Persoalan terbesar di Indonesia adalah kesehatan reproduksi perempuan. Masalah yang sering terjadi adanya stigma tenaga medis jika da anak remaja yang ke puskesmas

- Aborsi tidak aman yaitu aborsi yang dillakukan ditempat yang tidak sesuai kesehatan
- Aborsi bisa dilakuakn jika Mengancam kehidupan dan kasus perkosaan bisa dilakukan kapan saja disebut aborsi kedaulatan

Pemberain gizi kepada perempuan dimulai pada usia Remaja, Pengontrolan kehamilan.

Meningkatya pernikahan anak muda: hamil dluar nikah (pendidikan kesehatan reproduksi).

Vietnam belum memberikan perhatian pemerintah tetapi tingkat kematian Ibu kecil karena melakuan pendekatan budaya.

Solusi yang dapat di lakukan adalah Perda harus ada untuk mendukung regulasi dana untuk kesehatna reproduksi perempuan

DPR belum memahami tentag SDGs, sehingga UUD belum bisa dilakuan Good will itu yang harus di pahami oleh pemda sehinga dapat mendukung pencapain SDGs.

## K Cony Tiluata

Banyak produk UUD tetapi tidak dijalani MDGs keja sndiri, SDGs kerjanya berkolaborasi. Dana dapat diperoleh dari CSR.

**Ibu Zum** : UUD dibentuk lama akan mempengaruhi perkembangan SDGS

## Ibu Baju merah :

*Pemda berperan dalam memberikan sangsi bagi OPD-OPD yang memahami tentang aturan2 yang berkaitan SDGs*

## Ibu Ansi Rih Dara:

*SDGs tidak ada dana baru, pemahaman PEMDA melaksanakan SDGs ada dana baru padahal RAPBD harus dikaitan dengan capaian SDGs*

### **Ibu Frederika Tadu Hungu :**

*Perkuatan system dan masyarakat memberi nilai bukan sebagai bisnis, sehingga mencapai zero tidak mungkin tetapi cara untuk menurunkan contoh angka kemiskinan bisa dilakukan secara berkala*

*Tanya: Contoh2 baik yang bisa direplikasi gender equality harus berkaitan dengan goals SDGS yang lain.*

### **Ibu Zum :**

Contoh saat ini: Dampak budaya anak laki-laki bebas sedangkan perempuan bertanggung jawab hal ini berdampak bagi pendidikan dimana anak perempuan lebih tekun dibandingkan dengan laki-laki

Ekonomi: modal – perempuan harus punya izin suami, namun sekarang sudah bisa snediri, akses usaha harus dilihat bagi wanita yang potensial diberikan hak yang sama.

Pemerintahan: Perempuan memiliki kapasitas yang lebih sehingga meningkatkan efisiensi dalam bekerja.

Apakah pemda sudah melakukan lelang jabatan? Hal ini membuka peluang bagi wanita untuk berperan

Pajak perempuan lebih tinggi (lajang) dari pria, seharusnya sama nilai pajaknya. Hal ini terjadi juga di pemerintah.

### **Mbak Herni**

Semua poin dalam SDGs untuk ada dan pernah melakukan, sehingga tidak perlu lagi UUD atau aturan yang mengikat.

Penanggulangan kemiskinan – dana pembangunan --- dana pajak saling berkaitan dalam goal SDGs

**K Cony Tiluata:** optimis untuk mencapai SDGs, di kota kupang sudah ada POKJA baiknya diperkuat.

**Ibu Zum:** jika ada pokja ajak pemda untuk memperkuat pencapaian SDGS, semua stake holder juga harus di dorong untuk jalan bersama

### **Saran:**

- ✓ di NTT harus focus kepada goals yang paling menonjol sehingga dibuatkan peta jalan untuk bersama-sama mencapai goals tersebut, jadi tidak harus 17 goals dilakukan dalam 1 tahun.
- ✓ Jika stake holder (LSM) sudah mengingatkan dan mendorong PEMDA tetapi tidak merespon maka masalah ini diangkat ke media.

### **Bapak Desa Yopi Saudale**

- ✓ *Ujung tombak adalah masyarakat desa, terkait kewenangan pemerintah kab. Kupang dalam aturan pemda, tetapi semua program yang telah dilakukan didesa sudah termasuk dalam SDGs. Dana desa 10% untuk kesehatan dan pendidikan. Perencanaan sesuai dan melibatkan stake holders*

### **Bapak Desa Marthinus Leli**

- ✓ *Desa Tunfeu sudah membuat desa siaga, naketi/ dukun beranak budaya daerah. Pemdes membuat aturan jika ada yang melahirkan dirumah diberikan denda. Pemdes bekerja sama dengan kader posyandu untuk mengangarkan dana ke puskesmas melalui dana desa. Gizi buruk, desa meberkan dana unutk penyediaan makanan tambahan*

### **Ester Dai**

- ✓ *Saya optimis sampai 2030 ada pencapaian di SDGs, adanya peran pemerintah dan pelaku- pelaku aktif. Pembagian peran dari tiap komponen sehingga harapan sdgs bisa tercapai*

### **Ibu Zum**

Maisng-masing komponen memetakan kelebihan dan tugas masing2 tetapi bekerja bersama-sama. LSM harus mulai terbuka untuk bekerja sama demikian juga pemda.

LSM harus bekerja untuk mengevaluasi dan mengamankan setiap temuan dan berani untuk menegaskan ke pemerintah.

Terima kasih untuk usaha yang dilakukan untuk bapak desa tunfeu dan bapak yopi, dana desa cukup besar alokasikan untuk pencapaian SDGs

### ***Apakah bapak desa sudah melibatkan oknum lainnya?***

**Bpk Marthinus Leli:** Musrembangdes sebelumnya mengajak oknum lain pemuda, wanita dan lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama

**Ibu Zum: Bagaimana Cara menyakinkan program yang tidak dimasukan kedalam RPJMD?**

**Bpk Marthinus Leli:** Sebelum penetapan di sosialisasi dan priortas ke program utama, jika tidak diterima akan disisipkan dengan program lain.

**Ibu Zum:** bpk desa harus mengerjakan dengan baik agar dapat berjalan juga dapat dipilih ke berikutnya untuk menjadi kepala desa.

**Ibu Sabrina:** Program Generasi sehat, Gizi kembali ke masyarakat lahan pekarangan diubah jadi kebun gizi. Swadaya masyarakat terlebih dahulu baru dibantu oleh pemerintah desa. Masyarakat tidak miskin tetapi harus bisa mengelola halamannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

**Ibu Zum:** Kita harus memulai tanpa menunggu pemerintah.

**Selesai WITA 11. 05 WITA**  
**BREAK time 15 menit**

**Mulai 11.30 WITA**

Diskusi Kelompok “Partisipasi Perempuan untuk mencapai SDGs di NTT”  
*Pembagian kelompok berdasarkan lokasi Kota Kupang; Kab. Kupang dan TTU; Kab. TTS*

### **Pertanyaan**

- Kekuatan yang dimiliki oleh kota/kab. masing2
- Apa yang akan dikerjakan dan dukungan apa yang dibutuhkan dari Pihak eksternal dan internal?

### **DISKUSI 30 MENIT**

PIC: PRAKARSA

11. 56 WITA (Presentasi)

### **TTS:**

Kekuatan

- RPJMD 2019-2024 : menyerahkan rekomendasi isu agenda 1, 5, dan 8 ternyata sudah terintegrasi
- Kelompok kerja SDGs (SSP) dengan masyarakat sipil, dengan lembaga agama (gereja) pemerintah PKK
- SK bupati tentang implementasi 1, 5 dan 8 goals
- Kemitraan masyarakat, pemerintah dan NGO seperti Plan dan Koperasi

Dibutuhkan

- Sosialisasi SDGs dilembaga agama (rumah ibadah), media cetak dan elektronik,
- Mendorong pemerintah desa mulai mendata masyarakat,
- ruang pengaduan di dinas INFOKOM
- tools monitoring untuk mengevaluasi OPD

Dukungan

- Dana
- Kerjasama dengan pemda
- Lembaga NGO

### **Kota Kupang**

Kekuatan

- Pokja SDGs

- Kelurahan siaga
- Satgas perlindungan perempuan dan anak
- Kota ramah anak (sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak)
- Brigadir Kupang sehat
- TKPD
- Gugus TIGAS TPO
- Rasda
- Jamkesra
- CSO
- Kotaku (Kota tanpa Kumuh)

Dibutuhkan/ dilakukan

- Sosialisasi SDGs disemua level
- Mengaktifkan POKJA
- Pertemuan rutin untuk mengaktifkan POKJA sehingga terciptanya kolaborasi dengan CSO

Dukungan

- Adanya keseragaman informasi dalam bentuk leaflet untuk di sebarakan lewat media elektronik maupun media massa
- Capacity building didukung oleh prakarsa, Oxfam dan SDGS nasional (dalam pengisian matriks)
- Suatu jembatan (strategi) untuk membangun kolaborasi dari berbagai pihak

## **TTU dan Kab. Kupang**

### **Kab. TTU**

Kekuatan

- Jaringan di bagian legislative untuk membantu dan mendorong pemerintah daerah memahami SDGs
- Pemerintah dan telah melakukan goal 1,5 dan 8 secara berjenjang

Dibutuhkan/ dilakukan

- Sosialisasi dan konsolidasi stake holder dan lima 5 tahun (Tahun pertama -focus pemahaman SDGs; Tahun ke 2 –Pemantapan data, penguatan kelompok perempuan untuk SDGs, memperkuat forum SGD; Tahun 3 advokasi anggaran untuk desa. Keluarahn tahun ke 4 tmemonitoting rencan yang telah disiapkan tahun ke 5 ada evalusia bersama)

Dukungan

- Panduan SDGs – prakarsa
- Pelatihan manajemen berbasis data tingkat desa – Oxfam dan prakaraja
- Monitorotdng SDGs

### **Kab. Kupang**

- Sertifikasi komitmen inovasi desa
- Draft RPJMD sedang dirancang akan dimasukan tentang goals SDGs
- Alokasi dana desa yang mencukupi untuk mencapai goals 1,5 dan 8

Dilakukan/ dibutuhkan

- Sosialisasi dan konsolidasi stake holder 5 tahun (tahun pertama -focus pemahan SDGs, tahun ke 2 – pemantapan data, penguatan kelompok perempuan untuk SDGs, memperkuat forum SGDa, tahun 3 advokasi anggaran untuk desa. Keluarahn tahun ke 4 memonitoring rencan yang telah disiapkan; tahun ke 5 ada evalusia bersama)

*Dukungan sama dengan Kab. TTU*

*Diskusi: Mbak Herni*

## **Kesimpulan**

### **Rencana**

1. Sosialisasi yang lebih intens
2. Kebuthan untuk dialog dengan pemerintah

### **Dukungan**

*Media untuk sosialisasi, dan tools untuk memantau SDGS untuk tiap kab/kota masing-masing.*

*Riset prakarsa harus di laporkan ke kota/kab. Yang telah dilakukan riset.*

## **Mbak Herni: Kapan dilakukan sosialisasi?**

### **Ibu baju merah timles**

Diskusi di kelompok di desa, Pak Yopi (Bulan juli terkait dengan pemerintah Desa di tahun 2020 untuk menghasilkan prog. Pembangunan, bisa dilakukan sosialisasi (bulan mei),

### **Pak Marthinus lely**

Sosialisasi bulan mei, jika dana belum teralokasi dapat diajukan pada musrembangcam bulan 2 2020 untuk alokasi dana.

### **Cony Tiluata**

Usulan: Pihak desa harus bekerja sama dengan Tim PKPD dan PEMDA dan juga LSM

### **TTS**

Sosialisasi dengan kelompok berjalan, persiapkan waktu bersama prakarsa untuk tools SDGs

## **Mbak Herni Apakah yang dilakuan 1 dan 2 bulan untuk menggugah pemda?**

- Semua peserta bisa menyiapkan waktu untuk berbicara dengan pemda, dan prakarsa siap mendampingi dan mendukung

**Prakarsa siap menghubungi peserta kota/kab. Di NTT untuk berbicara dengan pemda dalam 1 atau 2 bulan kedepan**

Tambahan pak Dr Djonet

- Kolaborasi sudah masuk dalam setiap program tiap kab/kota
- Komitmen inovasi menyambung ke SDGs, tadi ada keraguan mencapai SDGs. Caranya adalah inovasi tadi. Jika diterapkan maka akan berhasil
- Diperlukan sekarang adalah semangat untuk mencapai semuanya, mulailah dari desa hingga ke tingkat kabupaten untuk memperkuat basis
- Tahapan Sosialisasi- bertemu pemda – legislative (menunggu pemilu dan dilantik bicara dengan eksekutif) maka kita harus masukkan isu SDGs setelah mereka dilantik

Tambahan Ibu Zum

- Jangan adanya gap antara oknum pemda dan NGO
- Masyarakat sipil punya semangat untuk mencapai SDGs oleh karena itu LSM harus melihat peluang ini

# I. Dokumentasi







# P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

---

## FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA



perkumpulan Prakarsa



theprakarsa



theprakarsa

[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)